

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu negara bisa menjadi makmur jika jumlah pengusaha sedikitnya 2 persen dari jumlah penduduknya. Pendapat ini diutarakan mending sosiolog Amerika Serikat, David McClelland puluhan tahun silam.¹ Menurut Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Syarif Hasan, jumlah wirausahawan Indonesia masih kurang ideal yaitu sebanyak 1,56 persen.²

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2013 terdapat 55,2 juta usaha kecil-menengah. Seluruh usaha tersebut memberikan kontribusi dalam PDB sebesar 57,9 persen dan kontribusi penyerapan tenaga kerja 97,2 persen.³

Tentunya kegiatan usaha tersebut memerlukan bantuan dari pemerintah melalui jasa-jasa Bank dan Lembaga Keuangan lain seperti bantuan modal, pinjaman, kerjasama dagang, simpanan dan sebagainya. Namun, permasalahan yang dihadapi terutama usaha skala menengah dan kecil adalah akses kredit.

¹Jumlah Wirausaha yang Ideal dalam Suatu Negara
<http://www.beritasatu.com/ekonomi-karier/166736-tahun-ini-kemenkop-akan-cetak-960000pengusaha.html>
(diakses pada 30 Januari 2015 pukul 18.06)

²Jumlah Wirausaha Indonesia
<http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/mikro/13/06/04/mnuwtkemenkop-ukm-wirausahawan-indonesia-belum-ideal>
(diakses pada 30 Januari 2015 pukul 18.08)

³Kontribusi UKM pada Pendapatan Negara
<http://www.kemperin.go.id/artikel/5774/Pertumbuhan-Ekonomi-Dorong-Ekspansi-UKM> (diakses pada 30 Januari 2015 pukul 18.09)

Perbankan syariah hadir di Indonesia untuk menawarkan sistem perbankan alternatif bagi umat islam yang membutuhkan atau ingin memperoleh layanan jasa perbankan tanpa adanya riba. Dengan semakin ketatnya persaingan antar bank syariah maupun persaingan dengan bank konvensional, membuat bank syariah dituntut harus memiliki kinerja yang baik agar mampu bersaing dalam pasar perbankan di Indonesia.

Perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah cukup signifikan, tidak bisa dilepaskan dari peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Lembaga ini dapat menjangkau masyarakat kalangan ekonomi mikro kecil dan menengah. Kedudukan LKMS dipresentasikan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), *Baitul Mal wat-Tamwil* (BMT) lembaga ini mempunyai peran yang cukup strategis dalam menjangkau transaksi syariah mikro kecil dan menengah di tengah masyarakat kabupaten atau kotamadya. Sehingga dapat memenuhi permintaan modal kerja dari masyarakat.

Tabel I.1 Data Jumlah Bank Dan Kantor Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia tahun 2007-2014

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah Bank	114	131	138	150	155	158	163	163
Jumlah Kantor	185	202	225	286	364	401	402	439

Sumber: Statistik Perbankan Syariah BI tahun 2014

Namun, realitas pembiayaan yang terjadi adalah BPRS belum menjadi model pembiayaan UKM menggantikan perbankan konvensional menurut Sekretaris Asosiasi Bank Syariah Indonesia Surakarta, Basrawi Yudi Nugroho menyatakan

“Kehadiran Bank Perkreditan Rakyat Syariah selama ini baru sebatas melengkapi pembiayaan dari perbankan konvensional, perbankan syariah dan unit usaha syariah. Keberadaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah di Surakarta dinilai belum memberi kontribusi berarti bagi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).”

Selain itu, Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Surakarta Wisnu Untoro di Surakarta, berdasarkan data Bank Indonesia, untuk kinerja perbankan per November 2013 mencapai Rp 46 triliun. Dari angka itu, pembiayaan perbankan syariah tercatat Rp 3,474 triliun. Dan khusus BPR Syariah hanya Rp 133 miliar.⁴ Bila dibandingkan, hal tersebut memiliki porsi yang sangat kecil meskipun pembiayaan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meningkat.

Dalam perjalanan usahanya, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak bisa memberikan kontribusi yang maksimal untuk mendukung kemajuan sektor riil, khususnya UKM. Hal ini terjadi karena pembiayaan yang diberikan didominasi oleh pembiayaan non bagi hasil (*murabahah* dan *ijarah*).

⁴Kinerja Pembiayaan Perbankan Syariah
<http://www.tempo.co/read/news/2014/01/23/092547823/Pembiayaan-BPR-Syariah-ke-UMKM-Masih-Minim>
(diakses tanggal 28 Januari 2015 pukul 15.17)

Tabel I.2 Komposisi Pembiayaan Yang Diberikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Per Desember 2014

(Juta Rupiah)	
Akad	2014
Akad Mudharabah	122.467
Akad Musyarakah	567.658
Akad Murabahah	3.965.543
Akad Salam	16
Akad Istishna	12.881
Akad Ijarah	5.179
Akad Qard	97.709
Multijasa	233.456

Sumber: Statistik Perbankan Syariah BI tahun 2014

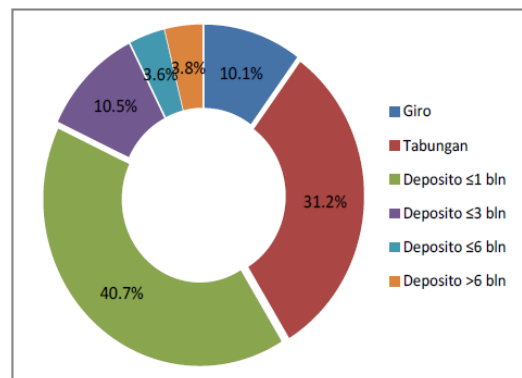
Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia, per Oktober 2009 total pembiayaan perbankan syariah mencapai 45,3 triliun dimana porsi pembiayaan *musyarakah* mencapai 6,4 triliun atau 14,1% dari total pembiayaan. Sedangkan pembiayaan *mudharabah* hanya sebesar Rp 10,2 triliun atau 22,5 %. Bandingkan dengan pembiayaan *murabahah* yang mencapai Rp 25,5 triliun atau porsinya sebesar 56,3%.⁵

Selain itu, rendahnya pembiayaan bagi hasil disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, tingginya prosentase pembiayaan *murabahah* dalam operasi investasi perbankan syariah karena cukup mudahnya mekanisme investasi jangka pendek.

Sumber dana BPRS masih sangat didominasi oleh pendanaan jangka pendek seperti tabungan ataupun giro. Hal ini terutama tercermin dari komposisi DPK BUS dan UUS yang sebagian besar terdiri atas instrumen giro dan tabungan yang sifatnya dapat ditarik sewaktu-waktu,

⁵Proporsi Pembiayaan Perbankan Syariah
<http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2009/12/31/problematika-pembiayaan-bagi-hasil46408.html> (diakses tanggal 29 Januari 2015 pukul 17.15)

serta deposito berjangka kurang atau sama dengan satu bulan, yang keseluruhannya memiliki porsi 82,0% dari total DPK ⁶. Sehingga tidak dapat digunakan untuk pembiayaan bagi hasil yang biasanya berjangka panjang.



Gambar I.1 Jangka Waktu DPK BUS & UUS (2013)

Selain itu, dari sisi jumlah rekening juga terjadi penurunan jumlah rekening deposito kelompok nasabah institusi hingga ± 20 ribu rekening karena cenderung lebih sensitif terhadap tingkat *return* mengingat ukuran dana yang relatif besar.

Penghimpunan dana pihak ketiga yang menjadi sumber dana bank syariah belum berjalan optimal dibandingkan penyaluran pembiayaan ujar Kepala Bidang Pengembangan BPRS Asbisindo Syahril T Alam. Kemudian, menurut data Bank Indonesia (BI), per Desember 2012 dari

⁶Jumlah Deposito *Mudharabah*
<http://www.bi.go.id/id/statistik/perbankan/syariah/Documents/SPS%20Des%202013.pdf> (diakses tanggal 30 Januari 2015 pukul 20.27)

total DPK perbankan di Jakarta yang sebesar 41.630,67 triliun, 99,93% pangasanya ada di tangan bank - bank umum. Sisanya ada di BPR.⁷

Tingginya margin bagi hasil yang dikenakan oleh BPR Syariah dibandingkan dengan bank umum, baik syariah maupun konvensional. karena tingkat nisbah bank syariah lazimnya menggunakan *going rate pricing*, yaitu menggunakan suku bunga pasar sebagai rujukan. Oleh karena itu, masih banyak masyarakat yang enggan untuk mengajukan pembiayaan ke BPR Syariah meskipun persyaratan dan prosedur yang lebih mudah dibandingkan dengan proses pengajuan pembiayaan di bank umum. Besarnya porsi nisbah bagi hasil yang tidak pasti karena. Jika bisnis sedang mengalami penurunan maka jumlah bagi hasil pun ikut menurun. Begitu juga ketika bisnis meningkat.⁸

Tingkat pembiayaan bermasalah yang besar. Pada BPRS, pertumbuhan pembiayaan *non performing* pada periode laporan mencapai 32,0% atau melebihi pertumbuhan pembiayaan BPRS dalam periode yang sama. Rasio NPF (*gross*) BPRS juga mengalami peningkatan dari 6.1% pada tahun 2012 menjadi 6.5% pada tahun 2013.⁹

Rasio NPF BPRS tersebut lebih tinggi dibandingkan rasio NPL industri BPR secara nasional pada posisi yang sama (4,4%), akan tetapi masih berada pada posisi yang relatif baik bila dibandingkan kriteria

⁷...<http://bprshik.co.id/news/index/31/DOA-KUDA-TROYA-MENEMBUS-JAKARTA> (diakses tanggal 30 Januari 2015 pukul 10.17)

⁸Faktor-faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Pembiayaan
<https://www.facebook.com/notes/...syariah-di.../207109049498774> (diakses tanggal 15 Januari pukul 14.15)

⁹...<http://www.ojk.go.id/dl.php?i=1932> (diakses tanggal 20 Januari 2015 pukul 21.14)

kualitas aset maksimal 7% pada penilaian tingkat kesehatan BPRS yang tergolong sehat.

Berdasarkan penjelasan masalah diatas, maka penelitian ini tertarik untuk membahas mengenai judul, “Pengaruh Jumlah Deposito *Mudharabah* dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Penyaluran Pembiayaan Bagi Hasil Oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Pulau Jawa.”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah yang mempengaruhi rendahnya penyaluran pembiayaan bagi hasil sebagai berikut:

1. Kurangnya kontribusi yang diberikan dari pembiayaan BPRS.
2. Kesenjangan jumlah dana pihak ketiga pada bentuk deposito berjangka.
3. Tingginya tingkat bagi hasil yang dikenakan bank
4. Rendahnya tingkat pendanaan jangka panjang.
5. Tingginya tingkat pembiayaan yang bermasalah oleh BPRS

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah tersebut, maka penulis membatasi masalah yang diteliti hanya pengaruh deposito syariah yang di ukur dengan menggunakan jumlah besarnya deposito *mudharabah* yang dihimpun; tingkat bagi hasil yang diukur dengan prosentase nisbah pada distribusi bagi hasil; dan pembiayaan bagi hasil yang diukur

dengan jumlah pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* berhubungan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

D. Perumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang penelitian yang dikemukakan diatas maka penulis mencoba merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah terdapat pengaruh jumlah dana deposito *mudharabah* terhadap penyaluran pembiayaan bagi hasil?
2. Apakah terdapat pengaruh tingkat bagi hasil terhadap penyaluran pembiayaan bagi hasil?
3. Apakah terdapat pengaruh jumlah dana deposito *mudharabah* dan tingkat bagi hasil terhadap penyaluran pembiayaan bagi hasil?

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis maupun praktis sebagai berikut,

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk memperdalam dan mengaplikasikan teori yang sudah diperoleh. Selain itu juga merupakan pelatihan intelektual yang diharapkan dapat mempertajam daya pikir ilmiah serta meningkatkan kompetensi keilmuan dalam disiplin ilmu yang digeluti khususnya mengenai penerapan teori akuntansi syariah.

Penelitian ini dapat menjadi bahan kajian bagi kalangan mahasiswa yang tertarik membahas topik mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan bagi hasil pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan tambahan kontribusi empiris mengenai variabel-variabel yang berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Menjadi bahan pertimbangan dan informasi bagi lembaga perbankan syariah dalam menghimpun dan mengelola dana dari nasabah secara amanah dan bertanggungjawab.

Sebagai bahan pertimbangan dan informasi bagi masyarakat agar beralih menggunakan pembiayaan bagi hasil karena dapat memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan sektor riil, khususnya UMKM yang menjadi indikator kemajuan roda perekonomian negara melalui kegiatan investasi.